

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN BRAMBANG

Azfandi Miftakhul Yaqin, M.R. Khairul Muluk, M. Makmur

Program Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang

Email. nganjoekensis88@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Serta untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat yang berawal dari pemberdayaan rumah tangga yang dimana mencakup tiga hal yaitu: pemberdayaan sosial ekonomi, pemberdayaan politik dan pemberdayaan psikologis. Dalam menyusun tesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah Kinerja Fasilitator Kecamatan dalam rangka pelaksanaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Hasil dari penelitian ini yaitu, kinerja fasilitator yang dimana masih adanya intervensi dari berbagai pihak yang dimana hal tersebut mengakibatkan proses pemberdayaan yang ada di masyarakat dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) dilapangan masih kurang maksimal mengingat adanya penyimpangan yang dilakukan dari berbagai pihak. Selain itu juga program yang seharusnya menjadi alat pengentasan kemiskinan bagi pemerintah digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendulang keuntungan bagi kepentingan pribadi ataupun golongan.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Fasilitator, Penguatan Komunitas

Abstract : This study aims to investigate the implementation of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) And to know the process of community empowerment that came from households in which empowerment includes three things that is: socio-economic empowerment, political empowerment and psychological empowerment.

In preparing this thesis, the research method used is descriptive research with a qualitative approach. Researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documents. The focus of the research study is the District Facilitator performance in the implementation of the Implementation of Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

Results from this study that, the performance of facilitators which is still the intervention of various parties which it resulted in a process of empowerment in the community in implementing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) field is still less than the maximum given the deviations from various parties. In addition, the program is supposed to be a tool for the government's poverty alleviation used by certain parties to gain advantage for personal or group interests.

Keyword : Performance, Facilitator, Community Empowerment

PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah masalah kemiskinan. Hal ini bisa dilihat dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009 sebesar 32,53 juta (14,15 persen). Mengalami penurunan sebesar 2,43 juta bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang berjumlah 34,96 juta (15,42 persen). Di tahun 2010, angka kemiskinan ditargetkan bisa turun lagi hingga mencapai 12-13,5 persen. Membaiknya

kondisi kemiskinan secara umum merupakan dampak dari berbagai campur tangan pemerintah dimana pemerintah memandang pemerintah perlu melakukan campur tangan dalam perekonomian nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun tidak selamanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian menyebabkan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khusaini ; 2006:5).

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), pendekatan pembangunan dilakukan melalui pembangunan dengan sistem partisipatif. Artinya, hasil pembangunan bukan lagi bersifat *given* dan *charity*, tapi lebih menggunakan model pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diperlakukan sebagai subyek / pelaku pembangunan yang berperan aktif dalam upaya menentukan bentuk program yang akan dilangsungkan. Atau dengan kata lain pembangunan partisipatif adalah (1) pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai subyek atas program pembangunan yang diperuntukkan bagi kepentingan mereka sendiri ; (2) Pelibatan masyarakat mulai dari tahap perencanaan-pelaksanaan-monitoring-evaluasi ; dan (3) Pengerahan massa (baca: mobilisasi) diperlukan jika program berupa padat karya. Sementara itu, upaya-upaya penanggulangan kemiskinan melalui masing-masing sektor terkait terus dilakukan dalam rangka memperbaiki kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti air minum dan sanitasi, keluarga berencana dan kesehatan ibu hamil dan balita, pangan dan gizi. Berbagai program tersebut pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin melalui pola pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*". Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan masyarakat adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai proyek, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat, adalah konsep yang relatif baru dan bertolak belakang dengan konsep pembangunan yang berorientasi pada "proyek", artinya, peran birokrasi yang besar dan seringkali dijalankan sebagai program pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, tapi masyarakat itu sendiri tidak terlibat di dalamnya.

Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan PNPM-MPd yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program yang *pro poor*, yaitu keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi kompetisi sehat akuntabilitas dan keberlanjutan. Dengan prinsip-prinsip dasar diatas pelaksanaan PNPM-MPd sampai tahun ke 9, telah menghasilkan pembangunan Infrastruktur berbagai bentuk seperti pengerasan jalan, perbaikan/pembuatan jembatan, perpipaan air bersih, sumur air bersih, sumur irigasi, bangunan polindes, MCK, saluran irigasi/plengsengan, rehab dam, gedung sekolah (TK), pasar desa, pelatihan keterampilan dan posyandu. Selain berupa bangunan fisik (85,56%), sasaran dana juga ditujukan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP; 3,08%) dan simpan pinjam perempuan (SPP; 91,01%). Dari uraian hasil pembangunan diatas tidak lepas dari peran serta masyarakat perdesaan sendiri yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan program ini sebagai pelaku utama di lapangan.

Dengan adanya latar belakang tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat yang mandiri di tingkat perdesaan yang didasari dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengambil judul " Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Brambang.

Belum ada kata sepakat tentang definisi kemiskinan, hal ini bisa dilihat dari beberapa pendapat antara lain, definisi yang sering dipakai untuk menggambarkan kemiskinan adalah

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang baik yang mencakup material maupun non material (Reitsma dan Kleinpenning, 1985). Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena ; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai ; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontraproduktif.

Friedmann (1992,h.131) juga merumuskan kemiskinan sebagai minimnya kebutuhan dasar sebagaimana yang dirumuskan dalam konferensi ILO tahun 1976. Kebutuhan dasar menurut konferensi itu dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan minimum dari suatu keluarga akan konsumsi privat (pangan, sandang, papan dan sebagainya).
2. Pelayanan esensial atas konsumsi kolektif yang disediakan oleh dan untuk komunitas pada umumnya (air minum sehat, sanitasi, tenaga listrik, angkutan umum, dan fasilitas kesehatan dan pendidikan).
3. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka
4. Terpenuhinya tingkat absolut kebutuhan dasar dalam kerangka kerja yang lebih luas dari hak-hak dasar manusia.
5. Penciptaan lapangan kerja (*employment*) baik sebagai alat maupun tujuan dari strategi kebutuhan dasar.

BAPPENAS (2004,h.13) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin, BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain ; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objektive* dan *subjective*.

Menurut Ife (1995,h.82), pemberdayaan berarti “ *providing people with the resources, opportunities, knowledges, and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community.*” Pemberdayaan masyarakat berarti menyiapkan kepada masyarakat dengan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Sedangkan Kartasasmita (1995, h. 87) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Pranaka (1996, h.44) menjelaskan *Empowerment* yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan” adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Untuk memahami konsep *empowerment* secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep *empowerment* mulai nampak disekitar dekade 70-an, dan kemudian

berkembang terus sepanjang dekade 80-an dan sampai saat ini pada dekade 90-an pada akhir Abad ke-20.

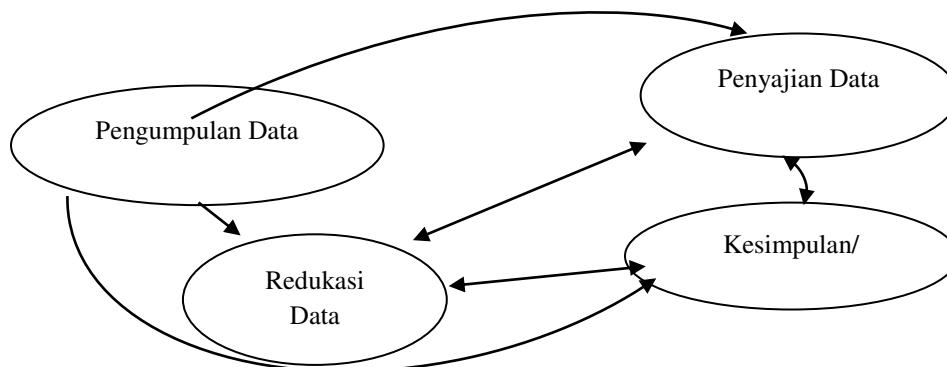
METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Brambang yang didasarkan pada (1) Pemberdayaan sosial ekonomi yang difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga dalam proses produksi seperti akses informasi, pengetahuan, dan ketrampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses kepada sumber-sumber keuangan.(2)Pemberdayaan politik difokuskan pada upaya menciptakan akses bagi setiap rumah tangga ke dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. (3)Pemberdayaan psikologis difokuskan pada upaya membangun kepercayaan diri bagi setiap rumah tangga yang lemah. Kepercayaan diri adalah proses pemberdayaan sosial ekonomi dan pemberdayaan politik

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi Kabupaten Brambang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan : Pengamatan (*Observasi*),Wawancara (*Interview*). dan *Dokumentasi*

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif, dimana dalam model initerdapat tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Hubberman, 1992, h. 20). Selanjutnya analisis dilakukan dengan memadukan secara interaktif ketiga komponen tersebut, dapat disajikan dengan bagan 1 :



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Di Kabupaten Brambang

Kabupaten Brambang merupakan salah satu kabupaten yang menerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang dimana didalamnya terdapat proses pelaksanaan PNPM-MPd yang dapat dilihat dari segi pemberdayaan sosial ekonomi, pemberdayaan politik dan pemberdayaan psikologis untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat kabupaten brambang terlihat dari banyak penggunaan dana perguliran simpan pinjam perempuan sebagai dana *stimulus* dalam pengembangan perekonomian masyarakat setempat. Tetapi masih belum didukung dengan pembinaan usaha yang optimal. Peminjaman hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut diperkuat pendapat salah satu masyarakat yang berinisial M yang dimana desanya merupakan penerima bantuan langsung PNPM-MPd dijelaskan bahwa “ peminjaman uang di

PNPM-MPd untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mengingat peminjaman yang berbunga cuma 1% dan tidak memakai jaminan, tidak seperti pinjaman pada bank harian ” (wawancara tanggal 12 April 2012 di desa M kecamatan P).

Sedangkan untuk pemberdayaan politik masyarakat di Kabupaten Brambang dilihat dari salah satu penduduk di desa S kecamatan L menyatakan bahwa kepala desa setempat sudah sering mengajak masyarakat untuk bersama-sama memikirkan dan mencari jalan keluar dalam menghadapi permasalahan yang ada di desa.(wawancara tanggal 20 april 2012 di desa S kecamatan L). Dalam pelaksanaan musyawarah antar desa setiap desa sudah dapat memikirkan kebutuhan prasarana dan sarana umum di desa masing-masing. Dalam forum mereka sudah dapat melakukan *barter* kepentingan dalam rangka pembangunan desa masing-masing sehingga prioritas pembangunan di desa-desa dapat berjalan secara merata. Tetapi masih ditemukan adanya intervensi dari pihak birokrasi dalam melaksanakan pemberdayaan, hal tersebut terjadi karena adanya tendensi kepentingan dari para elit politik di tingkat kabupaten. Seringkali ditemui bahwa bupati melakukan kecurangan dengan dalih pemberian bantuan program tetapi disisi lain untuk melakukan kampanye terselubung mengingat bupati yang bersangkutan akan maju ke pemilihan umum kepala daerah pada periode yang akan datang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan saudara L dijelaskan bahwa “ bupati sering turun ke lapangan untuk memberikan bantuan tetapi pada saat acara penyerahan bantuan yang diberikan sering diklaim pemberian pribadi bukan atas nama program dari pusat.(wawancara pada tanggal 27 April 2012 di Kantor Kecamatan W).

Selain itu dapat ditunjukkan dengan adanya data sebagai berikut :

Tabel 1. Data Jumlah Bantuan Sembako

No	Jenis Bantuan	Jumlah	Desa	Kecamatan	Tanggal
1.	Paket sembako (Beras, Minyak Goreng, Mie instan, Gula Pasir)	34 Paket	Jmb	Brn	20 Juni 2012
2.	Paket Sembako (Beras dan Gula Pasir)	21 Paket	Sdkr	Rjs	01 Agustus 2012
3.	Paket Sembako (Mie Instan, Minyak goreng, Beras)	16 Paket	Bjng	Ngly	04 Agustus 2012
4.	Paket Sembako (Mie Instan, Minyak Goreng, Beras)	1000 Paket	Slmrj	Brbk	18 Juni 2012
5.	Bantuan Rehab Rumah tidak layak huni	@ Rp. 2.500.000,-	- Smbrj - Nglnng - Mjst - Krngsm	Gndng	29 Maret 2012
6.	Paket Sembako	-	- Jwt - Tjklng - Kltn - Cngk	Ngrt	22 Juni 2012
7.	- Paket Sembako - Bea siswa	10 paket 16 Desa	- Klrh - Tjnm - Wrjyng	Tjnm	04 April 2012
8.	Paket Sembako (beras,minyak goreng, gula pasir)	44 Paket	Dwhn	Jtkln	19 Juni 2012

Sumber : Data Pemberian Bantuan Sembako 2012

Di lapangan dalam peneliti melaksanakan penelitian juga banyak menemukan bahwa masyarakat kabupaten brambang sudah bisa membangun asosiasi politik dilihat dengan adanya kelompok-kelompok yang dimana memiliki kepentingan sama yaitu membangun kabupaten brambang untuk menuju kemandirian. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat salah satu staf kantor pemberdayaan masyarakat dijelaskan bahwa sekarang sudah mulai muncul kelompok-kelompok yang dimana tujuan dari kelompok tersebut untuk mencapai kemandirian dengan berlandaskan berwirausaha (wawancara dengan bapak A pada tanggal 30 April 2012 di kantor pemberdayaan masyarakat). Untuk pemberdayaan psikologis dapat dilihat dari dampak pemberdayaan politik dan pemberdayaan sosial ekonomi yang dimana psikologis masyarakat di kabupaten brambang dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Hal tersebut merupakan indikator dari kemandirian masyarakat di Kabupaten Brambang. Dari hasil penelitian dapat dilihat jumlah kelompok masyarakat yang dimana sebagai pemanfaat dana simpan pinjam perempuan dapat ditunjukkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Data SPP tahun 2011 dari alokasi BLM

No	Kecamatan	Total	Jumlah	
			Kelompok	Pemanfaat
1	Sawah	134,000,000	8	53
2	Ngetos	126,315,700	9	100
3	Berbek	736,100,100	50	569
4	Loceret	57,894,800	3	30
5	Pace	148,821,300	13	141
6	Tanjunganom			
7	Prambon	117,894,700	12	112
8	Ngronggot	128,416,500	12	128
9	Patianrowo	500,000,000	40	479
10	Baron	500,000,000	29	339
11	Gondang			
12	Sukomoro	73,683,500	9	60
13	Wilangan			
14	Rejoso	149,473,700	14	155
15	Ngluyu	250,000,000	15	144
16	Lengkong	15,789,500	1	15
17	Jatikalén	83,153,000	5	60
Total		3,021,542,800	220	2,385

Sumber : Profil PNPM-MPd Kabupaten Brambang Tahun 2011

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 17 kecamatan terdapat 3 kecamatan yang tidak menerima alokasi bantuan langsung masyarakat yang diperuntukkan untuk simpan pinjam bagi perempuan. Sedangkan 6 kecamatan yang memiliki alokasi tersebut hanya memiliki jumlah kelompok pemanfaat yang cukup rendah dalam memanfaatkan dana stimulan tersebut. Hal tersebut menunjukkan tingkat responsif masyarakat dalam memanfaatkan dana stimulan yang diberikan oleh pemerintah dalam membantu memperbaiki perekonomian keluarga di desa-desa.

Selain untuk digunakan sebagai dana stimulan kepada masyarakat dana PNPM-MPd dikabupaten Brambang juga digunakan sebagai pembangunan sarana dan prasarana dalam proses perencanaan pembangunan sarana dan prasarana juga mengalami proses yang panjang. Adapun tahapan yang dilalui sebagai berikut :

1. Musyawarah desa yang dilakukan oleh masyarakat pada tingkat desa yang dimana mereka sendiri yang merencanakan agenda tahun ini untuk pembangunan desa mereka sendiri.
2. Setelah diadakan musyawarah desa adanya musyawarah antar desa yang dimana para wakil pelaku di tingkat desa melakukan perangkingan atau prioritas pembangunan hal tersebut dinilai dari penting atau tidaknya rencana pembangunan tersebut. Mengingat pendanaan yang terbatas juga dan tidak sesuai dengan jumlah desa pada tiap-tiap kecamatan.
3. Setelah adanya perangkingan tersebut pihak Unit Pengelola Kegiatan segera menetapkan hasil rumusan tersebut dan menjadi agenda tahunan dalam rangka pembangunan infratraktur sesuai dengan musyawarah antar desa yang telah ditetapkan.

Hal tersebut ditunjukkan hasil pembangunan pada tahun 2011 dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil Pembangunan Sarana dan Prasarana PNPM-MPd

Jenis Kegiatan	Jumlah			Biaya		Pemanfaat		
	Unit	Panjang (m)	Luas (m2)	BLM	Swadaya	L	P	RTM
Sarana Prasarana								
1 Jalan	99	43.564		5.390.383.200	321.056.550	39.109	45.946	40.195
2 Jembatan	1	3		39.646.400	1.000.000	143	133	276
3 Air Bersih								
4 Irigasi	38	21.162		2.549.580.200	131.988.200	25.708	30.755	27.615
5 MCK	4		18	63.770.100	1.200.000	200	250	410
6 Listrik Desa								
7 Lain2 Prasarana	9	1.972	30	500.417.750	31.837.500	3.088	3478	3.282
Pendidikan								
1 Gedung Pend.	42	150	5.805	3.438.173.600	256.578.900	5.266	5.136	5.082
2 Beasiswa								
3 Insentif Tenaga Pendidikan								
4 Prasarana Pendidikan Lain	3			100.675.400	2.000.000	23	91	48
Kesehatan								
1 Gedung Kes.	6		414	546.210.500	4.0529.500	1.306	1.368	1.042
2 Posyandu								
3 Pemb. makanan tambahan								
4 Insentif Tenaga Kesehatan								
5 Prasarana Kes. Lain								
Kegiatan Dana Bergulir								
1 SPP	220			3.021.142.800	1.635.000		2.385	1.825
2 UEP								
Jumlah	422	66.851	6.267	15.650.000.000	751.355.650	74.843	89.542	79.775

Sumber : Profil PNPM-MPd Kabupaten Brambang Tahun 2011

Dalam melaksanakan program tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dijalankan seiring hal tersebut dilakukan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan hal tersebut. Mengingat hal tersebut merupakan hal yang utama dalam menentukan arah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan maupun desa itu sendiri. Adapun data yang menunjukkan hal tersebut seperti dibawah ini :

NO	Tahap Kegiatan	Progres	Desa		Tanggal kegiatan	Jumlah partisipan				Kualitas partisipan			
			sudah	belum		Total	Laki-laki	Perempuan	RT. Miskin	Sangat Aktif	Aktif	Rata-rata	Rendah
1	Musyawarah Antar Desa I	-	-	-	17/06/09-08/12/10	1.456	682	774	250	0	17	0	0
2	Musyawarah Desa I (sosialisasi)	100%	234	0	02/09/09- 26/08/10	11.151	5.128	6.023	5.112	0	17	0	0
3	Penggalian Gagasan	100%	234	0	10/10/09- 13/01/11	25.227	11.361	13.866	13.645	0	17	1	0
4	Musyawarah Khusus Perempuan	100%	234	0	13/11/09- 10/02/11	7.160	0	7.160	4.192	0	17	0	0
5	Musyawarah Desa II	100%	234	0	16/11/09- 10/02/11	11.409	5.242	6.167	5.118	0	17	0	0
6	Musrenbang Desa	100%	234	0	17/01/11- 10/03/11	11.409	5.242	6.167	5.118	0	17	0	0
7	Musyawarah Antar Desa II (Prioritas)	-	-	-	31/01/11- 20/04/11	1.734	944	790	332	0	17	0	0
8	Musrenbang Kecamatan (Integrasi)	-	-	-	31/01/11- 10/02/11	1.752	950	802	262	0	17	0	0
9	Musyawarah Antar Desa II (Pendanaan)	-	-	-	20/04/11- 27/07/11	1.385	630	755	0	1	16	0	0
10	Musyawarah Desa III (Informasi)	100%	234	0	23/04/11- 26/08/11	10.107	4.387	5.720	5.070	0	17	0	0
11	MD Pertanggungjawaban Tahap I	100%	182	0	23/06/11- 01/03/12	7.345	3.879	3.466	3.948	0	17	0	0
12	MD Pertanggungjawaban Tahap II	100%	182	0	07/07/11- 15/03/12	7.913	3.800	4.113	4.219	0	17	0	0
13	MD serah terima	100%	190	0	14/07/11- 05/04/12	8.558	4.121	4.437	4.037	0	17	0	0

Sumber :Data Progres PNPM-MPd Kabupaten Brambang Tahun 2012

Tabel diatas jika dilihat secara menyeluruh menunjukkan pada dasarnya masyarakat telah melaksanakan semua tahapan yang telah ditetapkan dalam aturan program yang ada. Sehingga untuk sementara ini dalam proses perencanaan antara PNPM-MPd dengan musrenbang kecamatan masih berjalan dengan sendiri. Jika dilihat dari tingkat partisipasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 sudah ada keaktifan masyarakat dalam menjalankan perencanaan pembangunan khususnya dalam perencanaan pembangunan melalui PNPM-MPd.

Selain data diatas juga tabel dibawah ini menyebutkan jumlah pemanfaat untuk simpan pinjam bagi perempuan dan penggunaan dana stimulan bagi pengguna dana usaha ekonomi produktif. Yang dimana diperuntukkan untuk para masyarakat yang memiliki usaha rumah tangga dalam pengembangan ke usaha yang lebih produktif dan berkembang ke arah usaha yang lebih baik dari sebelumnya.

Tabel 4. Perkembangan Dana Simpan Pinjam Perempuan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

No.	Kecamatan	Jumlah Kelompok		Jumlah anggota SPP/UEP	
		SPP	UEP	SPP	UEP
1	Lengkong	215		1.755	
2	Sawahan	245	5	1.843	48
3	Berbek	182		1.977	
4	Gondang	183	4	1.826	60
5	Ngluyu	69		672	
6	Prambon	124		1.459	
7	Ngetos	224	11	2.188	98
8	Tanjunganom	327		2.832	
9	Baron	117		1.036	
10	Pace	104		1.341	
11	Loceret	144		1.401	
12	Wilangan	105		892	432
13	Sukomoro	131		1.140	
14	Rejoso	179		1.650	
15	Patianrowo	178		2.337	
16	Ngronggot	118		1.665	
17	Jatikalén	76	16	904	102
	Jumlah	2.721	36	26.918	740

Sumber : Data Progres PNPM-MPd Kabupaten Brambang Tahun 2012

Data diatas menjelaskan bahwa Kabupaten Brambang pada tahun 2012 memiliki total jumlah kelompok pemanfaat untuk kegiatan simpan pinjam perempuan sebanyak 2.721 (dua ribu tujuh ratus

dua puluh satu) kelompok sedangkan untuk usaha ekonomi produktif sebanyak 36 (tiga puluh enam) kelompok. Adapun untuk jumlah keseluruhan anggota untuk kegiatan simpan pinjam perempuan sampai pada tahun 2012 berjumlah 26.918 (dua puluh enam sembilan ratus delapan belas) orang dan untuk pemanfaat kegiatan usaha ekonomi produktif sebanyak 740 (tujuh ratus empat puluh) orang. Dari jumlah tersebut dapat disimpulkan dari 17 kecamatan yang mendapat alokasi bantuan langsung masyarakat masih banyak masyarakat yang belum maksimal menggunakan dana anggaran tersebut untuk menaikkan taraf hidupnya. Masyarakat di Kabupaten Brambang masih berpola pada kehidupan yang lama mereka tetap masih mengandalkan rentenir yang ada di sekitar masyarakat desa. Hal tersebut diperkuat dengan adanya pernyataan salah satu Penanggungjawab Operasional Kecamatan pada kecamatan P yang dimana mengatakan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar meskipun sudah ada sosialisasi baik melalui media elektronik seperti radio ataupun penyuluhan ke desa-desa tetapi mereka masih mengandalkan dalam penopang ekonomi mereka menggunakan rentenir dalam memberikan pinjaman keuangan padahal bunga yang diberikan lebih tinggi dari bunga yang ditetapkan para unit pengelola kegiatan pada kecamatan (wawancara pada tanggal 12 Juni 2013 di Kantor Kecamatan P).

KESIMPULAN

Proses pemberdayaan yang berjalan di Kabupaten Brambang masih sering dicampuri urusan kepentingan politik yang dimana hanya menguntungkan beberapa golongan atau perorangan. Hal tersebut mengakibatkan peyimpangan persepsi konsep pemberdayaan yang sesungguhnya. Dalam artian yang dimaksud disini adalah agar masyarakat menyadari bahwa PNPM-MPd adalah program nasional dari pemerintah pusat yang dimana memiliki tujuan dalam pengentasan kemiskinan. Selama ini yang ada bahwa PNPM-MPd adalah buah hasil pemikiran dari kepala daerah yang diberikan kepada masyarakat tingkat desa. Dan akhirnya hal tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat yang menjadi pasif dalam partisipasi pelaksanaan program.

Mereka berpikir bantuan hibah yang diberikan hanya untuk pemenuhan kebutuhan sementara tanpa harus memikirkan keberlanjutan bantuan tersebut. Dampak dari hal tersebut merubah tujuan dari PNPM-MPd yang dimana semula untuk kemandirian dan keberdayaan menjadi pola pikir masyarakat yang konsumtif dan pasif.

SARAN

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik berbagai saran bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan yang dimana eksistensi dari pemberdayaan dalam rangka menuju masyarakat yang mandiri, berdaya guna dan partisipatif dalam proses pembangunan pada tingkat desa khususnya dan pada umumnya pada tingkat pemerintah secara luas.

Untuk itu dituntut peran aktif masyarakat dalam menggali informasi baik dari media cetak maupun elektronik serta berkoordinasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan program dan agar masyarakat desa lebih aktif dalam mendapatkan informasi agar kedepannya program-program yang bersifat pemberdayaan dapat sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre B. 1981. Strategi Anti Kemiskinan Lima Tahap. Analisa Tahap Tahun X, No.9. September 1981
- Bateman, Thomas S.1996.*Management Building Competitive Advantage*. Irwin. Chicago

- Bernadin, Jand Russel J.1993. Human Resource Management an experiential approach. Mc Graw-Hill International Edition. Siangapore
- Bryant, Coralie, White, Louise G.1989. Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang. Terjemah oleh Rusyanto L. LP3ES.Jakarta.
- Friedmann, J.1992. Empowerment: the politics of alternative development. Oxford. Blackwell Publishers
- Herrick, Bruce. 1983. Ekonomi Pembangunan. Bumi Aksara. Jakarta
- Ife, Jim. 1996. Community Development Creating community alternatives-vision, analysis and practice. Longman. Australia.
- Miles, B. Mathew dan A. Michael Huberman. 1987. Qualitative Data Analysis. Sage Publications. London New Delhi
- Petunjuk Tehnik Operasional PNPM Mandiri Perdesaan. 2009. Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta.
- Pranaka dan Priyono. 1996. Pemberdayaan Konsep,Kebijakan, dan Implementasi. CSIS. Jakarta
- Reitsma, H.A, and Kleinpenning, J.M.G. 1991. The third World in Perspective. Asssen. Van Gorcum
- Sedarmayanti, 2001, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, Mandar Maju, Bandung.